



INDONESIA INDICATOR

LAPORAN MEDIA CETAK

**Pj. Gubernur Jawa Tengah
Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M
(30 Januari 2025)**

Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
1	1	0	0	1

Daily Statistic

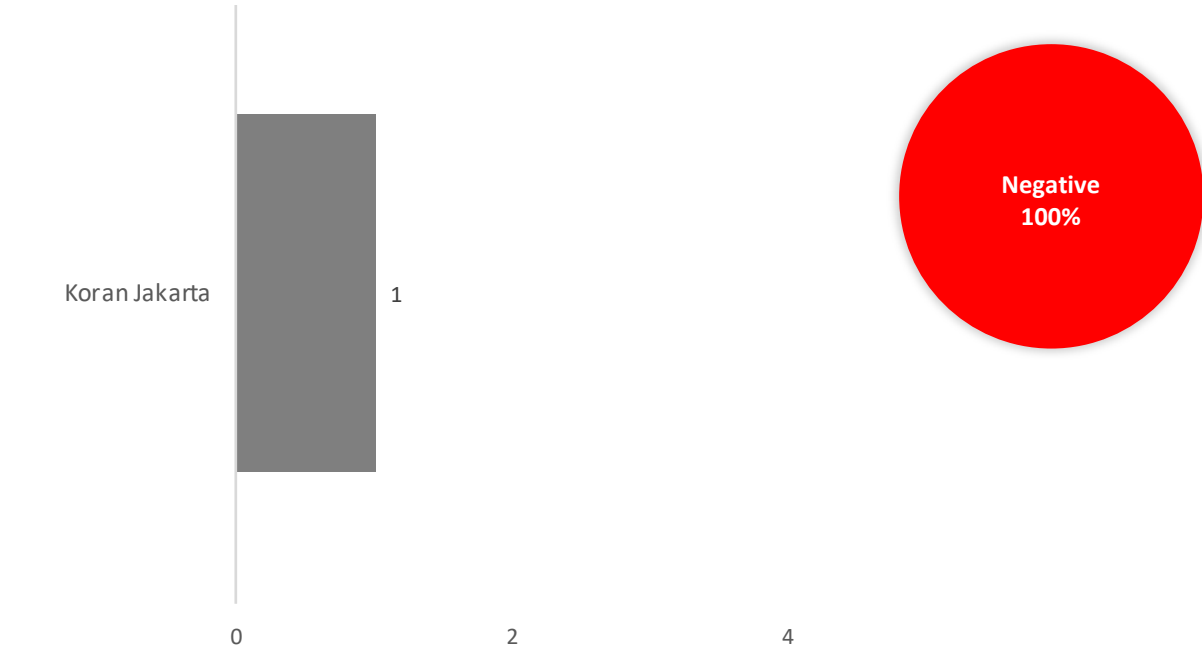


Table Of Contents : 30 Januari 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	30 Januari 2025	Koran Jakarta	Kasus PMK di Daerah Meluas	6	Negative	Abdul Kharis Almasyhari, Abdul Kharis, M Saleh, Joko Waluyo

Title	Kasus PMK di Daerah Meluas		
Media	Koran Jakarta	Reporter	Res/E-10
Date	2025-01-30	Tone	Negative
Page	6	PR Value	
Summary	<p>Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di daerah terus meningkat pada pekan terakhir bulan ini. Kasus itu dilaporkan terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta serta sejumlah wilayah lainnya. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan keprihatinannya atas kembali merebaknya kasus PMK pada 2025.</p> <ul style="list-style-type: none">- Karenanya, dia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), mengambil langkah cepat dan tegas menangani situasi ini guna melindungi sektor peternakan dan kesejahteraan masyarakat.- Politisi Fraksi PKS ini menekankan koordinasi lebih solid antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait untuk memastikan efektivitas langkah-langkah tersebut. Selain itu, Abdul Kharis meminta pemerintah memastikan ketersediaan vaksin PMK di seluruh wilayah terdampak dan mengawasi distribusinya agar sampai kepada peternak yang membutuhkan.		

Penyakit Ternak | Di Bekasi, Kasus PMK Terus Meningkat dalam Beberapa Pekan Terakhir

Kasus PMK di Daerah Meluas

Pemerintah harus memperkuat langkah antisipasi dan respons cepat di lapangan untuk mengendalikan penyebaran PMK yang sangat merugikan peternak.

JAKARTA - Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di daerah terus meningkat pada pekan terakhir bulan ini. Kasus itu dilaporkan terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta serta sejumlah wilayah lainnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan keprihatinannya atas kembali merebaknya kasus PMK pada 2025. Karenanya,

dia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), mengambil langkah cepat dan tegas menangani situasi ini guna melindungi sektor peternakan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kasus PMK yang kembali merebak ini membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi. Pemerintah harus memperkuat langkah antisipasi dan respons cepat di lapangan untuk mengendalikan penyebaran penyakit yang sangat merugikan peternak ini," ujar Abdul Kharis di Jakarta, Rabu (29/1). Politisi Fraksi PKS ini menekankan koordinasi lebih solid antara pemerintah pusat, daerah,

dan instansi terkait untuk memastikan efektivitas langkah-langkah tersebut.

"Kerja sama antara pusat dan daerah harus lebih diperkuat. Jika ditemukan kasus PMK di suatu wilayah, penutupan pasar hewan setempat harus dilakukan secepatnya. Selain itu, disinfeksi harus dilakukan tanpa toleransi. Tindakan ini penting untuk menghentikan rantai penularan," tegasnya.

Abdul Kharis juga menyuarakan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya peternak, tentang bahaya PMK dan langkah-langkah pencegahannya. Dia mendorong Kementan lebih gencar melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada peternak agar mereka memahami pentingnya vaksinasi dan tindakan pencegahan lainnya.

Selain itu, Abdul Kharis meminta pemerintah memastikan ketersediaan vaksin PMK di seluruh wilayah terdampak dan mengawasi distribusinya agar sampai kepada peternak yang membutuhkan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah penyebaran lebih luas



HARGA JUAL ANJOLIK | Peternak membawa sapi dagangannya untuk kembali dibawa pulang di pasar hewan yang tepi di Ngrivi, Jawa Timur, Rabu (29/1). Dari catatan dinas perikanan dan peternakan setempat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang merebak di Ngrivi menyebabkan 50 ekor sapi teranjat serta 54 ekor di antaranya mati, sementara di pasaran harga jual sapi anjlok dari kisaran 16 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah per ekor sehingga pasar hewan sepi penjual maupun pembeli.

dan meminimalkan kerugian ekonomi. Dengan berbagai langkah terintegrasi dan pelaksanaan kebijakan secara konsisten, Abdul Kharis optimis pemerintah mampu mengendalikan penyebaran PMK dan mencegah dampak negatif lebih besar. Adapun di Bekasi, Jawa Barat kasus PMK pada hewan ternak terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Tercatat, sebanyak 86 hewan ternak terinfeksi PMK sejak 21 Januari 2025.

kan biosecurity, seperti desinfeksi kandang dan pembatasan akses hewan baru, serta kondisi cuaca lembap akibat musim hujan yang memperburuk situasi. Pti Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (DPP), M. Saleh mengatakan kasus baru PMK di Jombang, Jawa Timur meningkat. Menjelang akhir Januari 2025, kini kasus sudah menyentuh 1.164.

"Per Senin (27/1), terma

kasus PMK di Kabupaten Jom

bang meningkat dan menyen

tuh 1.164 kasus dengan jumlah

kematian sapi mencapai 60

ekor," sebutnya.

Penutupan Diperpanjang

Dinas Kesehatan Pangan

dan Peternakan (DKPP) Ban

tul memutuskan penutupan

Pasar Hewan Imogiri yang me

rupakan pasar hewan terbesar

di Bantul diperpanjang hingga

dua pekan lagi.

Kepala Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Bantul,

Joko Wahyu menuturkan pe

nutupan Pasar Hewan Imo

giri semestinya berakhir Sen

(27/1). Mengingat kasus PMK

di Bantul tak kunjung turun,

pemda memutuskan memper

panjang penutupan pasar he

wan Imogiri hingga dua pekan

ke depan.

"Pasar Hewan Imogiri akan

ditutup hingga 10 Februari

mendatang," ungkapnya.

8 ers/E-10